PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun 2011-2015)

THE INFLUENCE PERIODIC TAX RETURN VALUE ADDED TAX (VAT) AND TAXABLE PERSON ON ACCEPTANCE OF VAT

(Case Study of Sumedang Tax Service Office years 2011-2015)

Desi Lestari

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Email* : *Desilestari1616@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted at Sumedang tax service office. The phenomena that occurred at Sumedang tax service office within 2011-2015 is the reduce Value Added Tax (VAT) receipts because the notice period of VAT not reported and Taxable Person who do not enroll. This research aims to provide empirical evidence about the influence of the notice letter about Value Added Tax (VAT)period and the influence of the Taxable Person against Acceptance of VAT at Sumedang tax service office.

This research is a quantitative study, using descriptive and verification methods. The population in this study is reports of VAT Period notice letter, reports abaout taxable person and acceptance of VAT, the sampling using jenuh sampling technique. Kind of data is secondary data in the from of 60 about VAT period notice letter, taxable person, and acceptance of VAT from 2011-2015. The data was analyzed by regression double linier technic with the help of Software SPSS v23.

The results showed that the notice letter of VAT period effect on acceptance of VAT and the amount of taxable person effect on acceptance of VAT at Sumedang tax serviced office.

Keywords: the Notice Period of VAT, Taxable Person, the Value Added Tax Receipts.

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia, yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara (Widi Widodo, 2010:1).

Pajak didefenisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditujukan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Penerimaan pajak merupakan salah satu alternatif yang diandalkan bagi pembangunan yang dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan rutin negara dan juga dapat digunakan untuk membantu proyek-proyek negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengembang tanggung jawab penerimaan tersebut dituntut untuk bekerja lebih keras agar target penerimaan pajak yang telah diestimasikan dalam APBN dapat tercapai secara optimal (Nur Hidayat, 2013:183).

Dalam penerapan sistem akuntansi berkomputer, kualitas pengguna harus diselaraskan dengan sistem yang akan diterapkan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan (Lilis Puspitawati, 2010:251).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Salah satu pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP. PPN yang disetorkan dan dilaporkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Jika PKP tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah PPN (Siti Resmi, 2011:5).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Surat Pemberitahuan Masa PPN yang merupakan laporan bulanan yang dapat disimpulkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (Mardiasmo, 2003:251).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan SPT Masa PPN (Wirawan dan Rudy, 2007:17).

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Masa dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka dari itu penulis mengangkat judul **"PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang ditemui, yaitu:

1) Masalah yang terjadi pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu belum tercapainya realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015.
2) Masalah yang terjadi pada Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada KPP Pratama Bandung Sumedang.
3) Masalah yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak adalah masih banyak pengusaha yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung Sumedang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Pertambahan Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktisi

Bagi perusahaan yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pikiran serta saran-saran yang dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan untuk Wajib Pajak yang membayar Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan menambah wawasan terkait Surat Pemberitahuan Masa PPN, Pengusaha Kena Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Pemberitahuan Masa

2.1.1.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Masa (SPT)

Mardiasmo (2011:31) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah

> Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kunia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah

> Dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Kemudian Menurut Sardana (2014:41) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah

> Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa sumber diatas maka Surat Pemberitahuan dapat dikatakan bahwa, Surat Pemberitahuan adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.1 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:45) diatur jangka waktunya untuk:

1) SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.
3) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 4 bulan setelah akhir tahun.

2.1.2.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Mardiasmo (2011:280) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Menurut Sardana (2014:26) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Kemudian Menurut Siti Resmi (2011:4) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksudkan dalam nomor 14 yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dari beberapa sumber diatas maka Pengusaha Kena Pajak dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.2.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Djoko Muljono (2008:6), Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan, antara lain:

1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang;
3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Theresia Woro Damayanti dan Supramono (2010:88) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah

Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah

Pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Kemudian menurut Dr. Oyok Abunyamin (2010:265) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah

> Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan.

Dari beberapa sumber diatas maka dapat dikatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

2.1.3.2 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2011:287) dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembelian berhak menerima bukti pemungut berupa faktur pajak.
2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak (Mardiasmo, 2008:29). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Ahmad Prayudi (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2011:5) dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Dedy Setya Utama Pandiangan (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjalankan aktivitas kewajiban perpajakaannya maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.3 Hipotesis

Sekaran (2014:135) mengemukakan pengertian Hipotesis bisa didefinisikan sebagai berikut :

> Hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1. Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sumadi (2013:29), defenisi operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

> Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefenisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan objek penelitian yaitu Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang.

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah, maka operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam gambar table dibawah ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Surat Pemberitahuan (Variabel X_1)	"Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". (Mardiasmo, 2011:31)	Jumlah laporan SPT Masa PPN yang masuk (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:43)	Rasio

Pengusaha Kena Pajak (Variabel X_2)	"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN". (Sardana, 2014:26)	Jumlah Wajib Pajak yang sudah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Mardiasmo, 2013:301)	Rasio
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Variabel Y)	"Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak". (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:235)	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Erly Suandy, 2011:35)	Rasio

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Toni Wijaya (2013:19) menyatakan bahwa data sekunder adalah

> Data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai. Data sekunder mampu memberkan informasi dalam pengembalian keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, tentunya penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di perusahaan.
2) Wawancara (*Interview*)
   Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Usman dan Akbar (2011:42) menyakatan bahwa populasi ialah

> Semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitaif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan Surat Pemberitahuan Masa PPN, laporan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Modul Penerimaan Negara pada periode bulan Januari sampai Desember selama 2011 sampai 2015.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian menurut Tony (2013:27) sampel adalah bagian dari populasi yang diambil/ditentukan kberdasarkan karakteristik dan teknik tertentu.

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sampling* jenuh.

Pengertian *sampling* jenuh menurut Sugiyono (2013:84) adalah

> *Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.4 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.

Didalam penggunaan analisis linier berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

1) Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011:163) tujuan uji normalitas adalah:

Untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011:105) tujuan uji multikolonieritas adalah:

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013:139) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas adalah:

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

4) Uji Autokolerasi

Menurut Imam Ghozali (2011:110) menyatakan bahwa uji autokolerasi adalah:

Untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnnya).

3.6 Metode Analisis Data

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah *Statitical Product and Service Solution* (SPSS). Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple*)

Menurut Albert Kurniawan (2010:52) mendefinisikan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

"Pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independent*/bebas dan 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*)".

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

(Albert Kurniawan, 2010:52)

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
X1 : Surat Pemberitahuan Masa PPN
X2 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)
a : Konstanta, (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)
b1 : Koefisien regresi Surat Pemberitahuan Masa PPN (nilai peningkatan atau penurunan)
b2 : koefisien regresi Jumlah Pengusaha Kena Pajak (nilai peningkata atau penurunan)
e : koefisien *error*

3.6.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2011:98) tujuan koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah :
"Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

Analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

(Umi Narimawati, 2010:50)

Dimana:
Kd = Koefisien Determinasi
r = Koefisien korelasi

Pada hakikatnya nilai r berkisar antara -1 dan 1, bila r mendekati -1 atau 1 maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila r mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat lemah atau bahkan tidak ada.

IV Hasil dan Pembahasan
4.1.1 Analisis verifikatif

Analisis verifikatif ini menggunakan analisis regresi. Dalam analisis regresi dikemukakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien-koefisien regresi tidak bias dan mendekati keadaan yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini maka asusmi regresi yang akan diuji adalah asumsi multikolinieritas, heterokedastisitas, normalitas, dan asumsi klasik.

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Syarat penggunaan metode regresi adalah data harus berdistribusi normal atau mendekati normal, dengan demikian pengujian untuk mengetahui hal tersebut dengan cara mendeteksi dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov.*

Pada tabel 4.4 diatas terlihat bahwa nilai asymp. Sig untuk variabel Surat Pemberitahuan Masa PPN bernilai 0.20 >= 0.05 dan Sig untuk variable Jumlah Pengusaha Kena Pajak bernilai 0.20 >= 0.05. Hal ini menunjukan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, sehingga asumsi uji normalitas data terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi kolerasi di antara variable-variabel bebas. Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan nilai *tolerance* harus lebih dari 10%. Dari hasil pengujian dengan menggunakan *software SPSS v23*, dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Menggunakan besaran *tolerance* (a) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) jika menggunakan alpha/tolance = 10% atau 0,10 maka VIF =10. Berdasarkan tabel 4.5 di atas terlihat bahwa nilai tolerance yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,970 = 97% diatas 10% dan *Variance Inflation Factor* (VIF) bernilai 1.031 < VIF = 10, dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahuin apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedastisitas.

Tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *park glejser,* dimana gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut residunya (e). Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alphanya (0,05), maka dapat dipastikan model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung unsur heteteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai masing-masing variabel independen > 0,05. Dimana nilai koefisien sig pada variabel Surat Pemberitahuan Masa PPN bernilai 0,147 > 0,05 dan variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak bernilai 0,828 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variable independen (Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak) tidak signifikan mempengaruhi variable dependent (penerimaan Pajak Pertambahan Nilai).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa nilai *Durbin Watson* (dW) yang diperoleh sebesar 1,754. Nilai akan dibandingkan dengan nilai dU dan 4-dU pada tabel Durbin Watson. Tingkat Signifikansi α = 0,1, dimana variabel bebas (k) sebanyak 2 dan sampel (n) 45, diperoleh nilai dL sebesar 1,383 dan dU sebesar 1,666, sehingga diperoleh nilai 4-dU sebesar 2,334 dan 4-dL sebesar 2,617. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 1,754, berada diantara nilai dU (1,383) dan 4-dU sebesar (2,334). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi, baik itu autokorelasi negatif maupun autokorelasi positif. Berdasarkan keempat hasil pengujian asumsi klasik di atas, diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik sehingga analisis regresi linier berganda dapat digunakan. Untuk lebih jelas, nilai-nilai di atas dapat disajikan pada gambar 4.4 dibawah ini:

4.1.3 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Dimana:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : Variabel *Dependent* (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai)
X_1: Variabel *Independent* (Surat Pemberitahuan Masa PPN)
X_2: Variabel *Independent* (Jumlah Pengusaha Kena Pajak)
a : Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)
b_1 : Koefisien regresi Surat Pemberitahuan Masa PPN (nilai peningkatan atau penurunan)
b_2 : Koefiisen regresi Jumlah PKP (nilai peningkatan atau penurunan)
e : Koefisien *Error.*

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *SPSS v23*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai a sebesar -13.211.905.191.21. Nilai koefisien arah garis (b_1) untuk X_1 sebesar 22.210.681.95 dan nilai koefisien arah garis (b_2) untuk X_2 sebesar 4.881.143.08. Maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: **Y = -13.211.905.191,21 + 22.210.681,95(X1) + 4.881.143,08(X2) + e**

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar -13.211.905.191.21 menyatakan bahwa ketika SPT Masa PPN dan Jumlah PKP bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Penerimaan PPN akan bernilai sebesar Rp -13.211.905.191.21.
b. Nilai SPT Masa PPN memiliki nilai koefisien regresi sebesar 22.210.681.95, artinya ketika SPT Masa PPN mengalami peningkatan, sementara Jumlah PKP dianggap konstan, maka Penerimaan PPN akan meningkat sebesar 22.210.681.95.
c. Nilai Jumlah PKP memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4.881.143.08. Artinya ketika Jumlah PKP mengalami peningkatan, sementara SPT Masa PPN dianggap konstan, maka Penerimaan PPN akan meningkat sebesar 4.881.143.08.

4.1.4 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat hubungan atau keeratan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut disajikan nilai koefisien korelasi dengan bantuan *software SPSS v23*. Kemudian nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel intrepretasi koefisien berikut:

Dari hasil koefisien korelasi antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN r = 0,579, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2010) maka eratnya korelasi SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya hubungan cukup kuat antara SPT Masa PPN dengan penerimaan PPN. Sedangkan arah hubungannya adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN maka semakin tinggi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (r^2) merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, untuk perhitungannya diambil dari korelasi bivariate pada tabel 4.9 adalah sebagai berikut:

- **Variabel SPT Masa PPN = $(0,579)^2$ x 100% = 33,52%**, diketahui nilai koefisien determinasi SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN sebesar 33,52%. Artinya variabel SPT Masa PPN memberikan kontribusi pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN sebesar 33,52%.

4.1.5 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat hubungan atau keeratan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut disajikan nilai koefisien korelasi dengan bantuan *software SPSS v23*. Kemudian nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel intrepretasi koefisien berikut:

Dari hasil koefisien korelasi antara jumlah PKP terhadap penerimaan PPN r = 0,210, ini berarti terdapat hubungan yang rendah antara jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Jika diinterprestasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2010) maka eratnya jumlah PKP terhadap penerimaan PPN adalah rendah karena berkisar antara 0,20 sampai dengan 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya hubungan rendah antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN. Artinya semakin rendah pengusaha kena pajak untuk mendaftarkan diri menjadi PKP maka semakin rendah terhadap penerimaan PPN.

2) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (r^2) merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN, untuk perhitungannya diambil dari korelasi bivariate pada tabel 4.10 adalah sebagai berikut:

- **Variabel jumlah PKP = $(0,210)^2$ x 100% = 4,41%**, diketahui nilai koefisien determinasi jumlah PKP terhadap penerimaan PPN sebesar 4,41%. Artinya variabel jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh pengaruh terhadap penerimaan PPN sebesar 4,41%.

4.2 Pembahasan

Setelah dilakukan beberapa pengujian dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini mengenai hasil pengujian untuk variabel Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.2.1 Analisis Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN Terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil hubungan yang diperoleh antara Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,579. Nilai korelasi bertanda positif, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat. Artinya semakin banyak Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Pemberitahuan Masa merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk masa pajak. Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak (Mardiasmo, 2008:29).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 33,52%, artinya 66,48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Surat Setoran Pajak PPN yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2003:23).

Hasil penelitian ini juga mendukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Nurrokhman (2012) dan Dedy Setya Utama Pandiangan (2011) yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.2.2 Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil hubungan yang diperoleh antara jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,210, ini berarti terdapat hubungan yang rendah antara jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin rendah jumlah Pengusaha Kena Pajak maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan rendah. Pentingnya faktor penerimaan Pajak pertambahan Nilai yang berhubungan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak karena pada prinsipnya pengusaha yang dikenai pajak wajib mendaftarkan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, jika Pengusaha Kena Pajak patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan maka semakin meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Haula Rosdiana et al, 2011:231).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 4,41% artinya 95,59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Adapun faktor lain yang mempenggaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Surat Setoran Pajak PPN yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2003:23).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arif Nurrokhman (2012) yang menyatkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy Setya Utama Pandinagan (2011) menyatakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak tehadap penerimaan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif Pengusaha Kena Pajak menjalankan aktivitas perpajakannya maka semakin besar pengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang tahun 2011-2015, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin meningkat Surat Pemberitahaun Masa PPN yang dilaporkan maka semakin meningkat pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai..
2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin rendah Pengusaha Kena Pajak yang mendaftarkan diri maka semakin rendah pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis/Operasional
   a. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN, disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang agar lebih baik lagi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
   b. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui jumlah Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang lebih baik lagi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak sehingga lebih memahami tentang pajak dan manfaat pajak bagi pembangunan negara.
2. Saran Akademis

   Penelitian ini hanya terbatas untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengeksplorasi atau mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selain variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini. Peneliti lainnya dapat meneliti dengan indikator, variabel, jumlah sampel serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

Albert Kurniawan. 2010. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom

Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Sleman: Deepublish

Djoko Muljono. 2008*. Ketentuan Umum Perpajakan lengkap dengan UU No. 2008 Tahun 2007*. Yogyakarta: Andi

Dr. Oyok Humaniora Abuyamin. 2010*. Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Buku Pendidikan-anggota IKAPI Mencerahkan Kehidupan

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Gujarat Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga

Haula Rosdiana dan Irianto, Slamet Edi. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia

Hamidi. 2007. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers

Imam Ghozali. 2011*. Aplikasi Analisis Multvariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21.* Edisi 7. Peneribit Universitas Diponegoro Semarang

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu. Yogakarta.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Nanang Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Santosa Singgih. 2002. *SPSS Statistik Parametik*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Sardana. 2014. *Kenali HAK DAN KEWAJIBAN Perpajakan Anda.* Bandung: Afabeta.

Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5* Cetakan Kedua Jakarta: Gramedia

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.

Sumadi Suryabrata,. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

R.Gunawan Sudarmanto. 2005. *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tanjung, H. dan Devi, A. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramatika Publishing.

Theresia Woro Damayanti dan Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Uma Sekaran. 2003. *Research Methods For Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori Dan Aplikasi.*Bandung:Agung Media

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis

Usman & Akbar. 2011. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung:Alfabeta

Wirawan B Ilyas & Rudy Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Dari Jurnal:

Ahmad Prayudi. 2010. *Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi Empiris pada KPP Medan Petisah*. Jurnal MANDIRI. Volume V; 14

Arif Nurrokhman. 2012. *Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Gayamsari*. Jurnal MANDIRI. Volume V; 1

Dedy Setya Utama Pandiangan. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi Empiris pada KPP Pratama Boyolali*. Hal 1.

Lilis Puspitawati. 2013. *Pengaruh Kemampuan Pengguna Informasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi*. Survey pada KPP Di Kanwil Jawa Barat 1.

Yohanes Kresna. 2014. *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi Empiris pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Hal 1.

Dari Web:

Yustinus Prastowo. 2016. "*Penerimaan Lebih Rendah"*. Diakses tanggal 20 Februari 2016. http://print.kompas.com/baca/2016/02/04/Penerimaan-Lebih-Rendah